

PROPOSAL

SIPURBA : Sistem Informasi Pelayanan Untuk Reformasi Birokrasi yang Akuntabel. (Integrasi Perizinan dan Pembayaran Pajak menggunakan Virtual Account)

📅 Tanggal Implementasi Inovasi

Wednesday, 01 January 2020

Kelompok **Umum**

Kategori **Kategori 2**

Efektifitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB

URL Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=0zltNxmZE_w

URL Bukti Iniasi Inovasi

<http://epajak.purbalinggakab.go.id/perijinan/>

SURAT KEPUTUSAN

Terlampir

Ringkasan (5%)

Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan, setidaknya meliputi: implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 200 kata.

SIPURBA merupakan jawaban dari kekusaran dan keluhan masyarakat tentang berbelitnya perizinan di Kabupaten Purbalingga dengan mengambil satu kasus yaitu perizinan penyelenggaraan reklame yang saat itu masih secara manual, sehingga pemohon harus mendatangi tiga lokasi yang berjauhan, yaitu DPMPSTSP untuk pengurusan izinnya, ke Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) untuk permohonan penetapan pajaknya, serta ke Bank Jateng untuk pembayarannya pajaknya dan kembali lagi ke BAKEUDA untuk pengambilan tanda pajaknya.

SiPURBA berdampak sangat signifikan dari segala segi. Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi ketiga instansi tersebut, mengantri di setiap loket, menghabiskan waktu seharian hanya untuk mengurus perizinan (misalnya pasang spanduk) yang hanya membayar pajak sebesar Rp.25.000. Sistem ini telah memangkas banyak waktu, biaya dan tenaga terutama untuk masyarakat/pemohon yang berasal dari luar daerah.

Tujuan kehadiran SiPURBA adalah memberi kemudahan,kecepatan,keterjangkauan kemandirian dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Relevansi SiPurba dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sangatlah nyata,khususnya untuk mewujudkan Reformasi birokrasi. Dengan berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, sekaligus untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau *NO ONE LEFT BEHIND*, alur perizinan pada layanan pemerintah yang

seringkali/memang dianggap berbelit, dengan kehadiran SiPURBA, benang kusut birokrasi telah terurai.

[Terlampir bukti dukung](#)

Ide Inovatif (20%)

Uraikan latar belakang dan tujuan dari inovasi, kesesuaian permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dengan kategori yang dipilih, dan sisi kebaruan atau nilai tambah dari inovasi ini dalam konteks wilayah Anda.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 600 kata.

Kinerja pelayanan Publik merupakan salah satu cermin kinerja birokrasi secara umum. Pelayanan Publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Pelayanan publik yang tidak akuntabel, lamban, berbelit belit menyebabkan citra pelayanan publik yang tidak baik dan pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan diharapkan kebijakan tersebut mampu memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Konsep ini ditekankan pada inovasi atau terobosan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberi akses yang mudah, cepat dan nyaman serta informatif melalui solusi konkrit berupa konsep sistem Pelayanan Terintegrasi dengan stakeholder terkait, sehingga koordinasi antar penyedia layanan tidak lagi dilakukan secara manual yang menyebabkan lambatnya pelayanan.

Latar belakang permasalahan dapat digambarkan bawta pada saat itu pemohon ijin raklame harus mendatangi tiga lokasi untuk pengurusan sebuah izin. Diawali dengan mendatangi DPMPSTSP (mengisi formulir dan persyaratan lainnya) untuk mendapatkan izin dalam berbentuk Surat Keputusan (SK), setelah itu pemohon juga harus mendatangi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) dan disana kembali diminta mengisi formulir untuk mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), setelah itu pemohon masih harus menuju Bank Jateng (bank persepsi) untuk melakukan pembayaran pajak, dan akhirnya kembali lagi ke BAKEUDA untuk mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan sticker tanda pajak yang nantinya ditempel pada obyek reklame sebagai bukti lunas pajak.

Untuk menjawab masalah tersebut, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima dalam arti pelayanan yang dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel dan adil perlu diarahkan untuk dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja bagi penyelenggara pemerintahan dengan cara menyediakan sistem yang terintegrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) selaku pengelola perizinan dengan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) selaku OPD mengelola pajak yang servernya telah terhubung dengan Bank Jateng (bank persepsi) untuk menerbitkan virtual account. sehingga pemohon izin tidak lagi harus menunggu lama untuk mendapatkan sebuah layanan.

Pelayanan langsung yang dapat dinikmati masyarakat yaitu melalui sistem informasi terkini yang mampu menghubungkan antara pengguna layanan, pemberi layanan dan perbankan secara real time., sehingga akuntabilitas, transparansi, dan kepastian waktu pelayanan serta birokrasi tanpa berbelit dapat

diwujudkan sesuai SOP yang ada.

Konsep utama dalam sistem ini adalah terintegrasinya data pemohon pada masing-masing OPD yang bersentuhan dengan penyelenggaraan reklame sebagai berikut :

1. Terintegrasi dengan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)

Sistem ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh BAKEUDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pendapatan dan pengelolaan keuangan.

2. Terintegrasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan penggunaan aplikasi terintegrasi ini, Satpol PP dapat mengakses data pemohon reklame yang berizin dan membayar sehingga mempermudah fungsinya dalam melakukan kegiatan penertiban di lapangan.

3. Terintegrasi dengan Bank Jateng

Cara pembayaran secara konvensional melalui teller bank saat ini telah banyak ditinggalkan, sebagaimana sistem *e-commerce*, pembayaran pajak juga menganut sistem terbaru ini. Penggunaan *Virtual Account* yang merupakan nomor identifikasi pemohon izin yang dibuka oleh Bank Jateng atas permintaan Bakeuda untuk selanjutnya diberikan oleh Bakeuda kepada pemohon sebagai No Rekening Tujuan penerimaan (*collection*).

Dengan telah terintegrasinya sistem pelayanan perizinan dengan OPD lain, saat ini pemohon izin cukup mengakses secara online dimana saja untuk mendapatkan layanan perizinan secara paripurna.

Sisi kebaruan pada aplikasi ini adalah pada sistem pembayarannya yang sudah terintegrasi dengan sistem perbankan terkini yaitu berbasis virtual account termasuk didalamnya QR Code yang sebelumnya hanya dijumpai pada sistem pembayaran e-commerce saja.

[Terlampir bukti dukung](#)

Signifikansi (25%)

Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/ asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/ keberhasilan inovasi.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 600 kata.

Implementasi SiPURBA berdampak sangat signifikan dari segala aspek baik waktu penyelesaian, biaya, dan efisiensi SDM. Dari segi waktu penyelesaian yang awalnya memakan waktu 3 sampai 5 hari, kini hanya butuh waktu hanya 30 sampai 60 menit saja dari berkas diunggah hingga mendapatkan Surat Keputusan. Dari segi biaya tentunya juga sangat memangkas signifikan sebagai contoh, perusahaan yang berdomisili di Jakarta ingin memperpanjang perizinan, maka mereka harus datang langsung Purbalingga dan mendatangi dan mengantri 3 tempat yang berbeda. Hal tersebut tentunya akan membutuhkan biaya ekonomi tinggi.

Tatacara pembayaran juga berubah sangat signifikan. Dari tata cara pembayaran yang konvensional menggunakan uang tunai melalui teller bank kini dengan SiPURBA diminimalisir dan dirubah mengikuti trend pembayaran masakini yaitu dengan menerbitkan virtual account yang pembayarannya dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan dilayani secara realtime selama 24 Jam tidak terpaku pada jam kerja perbankan.

Inovasi ini diimplementasikan dengan mengembangkan sistem informasi yang awalnya tidak terhubung dan hanya diakses secara sektoral di masing-masing OPD menjadi terintegrasi dan terhubung dengan hanya menggunakan sautu sistem untuk beberapa OPD bahkan tsistem ini juga terintegrasi dengan sub server dari bank persepsi dimana kode rekening masing-masing jenis izin disimpa dalam kaitannya pembuatan virtual account untuk masyarakat pengguna layanan. Itulah cara kerja SiPURBA untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Tolak ukur dari keberhasilan sistem ini adalah meningkatnya Nilai Indek Kepuasan Masyarakat dan jumlah pemohon. Peningkatan layanan izin reklame kepada masyarakat mengalami peningkatan signifikan dari baseline data tahun 2019 tercatat 463 izin dan pada tahun 2021 telah terlayani sebanyak 1.026 izin. Kepuasan masyarakat juga melangami peningkatan dari 83,61 di tahun 2019 menjadi 89,20 di tahun 2021.

Dampak lain dari keberhasilan SiPURBA ini adalah pada perolehan target realisasi yang sebelumnya tidak mencapai target menjadi melampau target.

[Terlampir bukti dukung](#)

Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)

Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 200 kata.

**Untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman:*

(<http://sdgs.bappenas.go.id/>)

Inovasi SiPURBA yang telah dikembangkan sejak tahun 2019 memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap capaian TPB Kabupaten Purbalingga utamanya pada tujuan “16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat” dan salah satunya diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi.

Bahwa inovasi menjadi salah satu komponen pengungkit reformasi birokrasi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik. Adanya SiPURBA menjadi salah satu perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan salah satu indikator yang nampak adalah meningkatnya IRB Tahun 2019 sebesar 64,09 menjadi 66,22 di tahun 2021.

Selain itu, penggunaan SiPURBA juga telah memenuhi standar pelayanan publik dengan kategori hijau dengan nilai 59.44 untuk jenis layanan perizinan reklame yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga.

Bahwa dengan adanya SiPURBA, maka peningkatan layanan izin reklame kepada masyarakat mengalami peningkatan signifikan dari baseline data tahun 2019 tercatat 463 izin dan pada tahun 2021 telah terlayani sebanyak 1.026 izin. Kepuasan masyarakat juga menjadi salah satu tolok ukur meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga. Dengan data tercatat IKM DPMPTSP tahun 2019 sebesar 83,61 menjadi 89,20 di tahun 2021.

Beberapa tolok ukur atas keberhasilan inovasi tersebut terhadap capaian TPB Kabupaten Purbalingga, diharapkan inovasi SiPURBA bisa menjadi salah satu pionir replikasi inovasi.

[Terlampir bukti dukung](#)

Adaptabilitas (20%)

Jelaskan bahwa inovasi telah diadaptasi/direplikasi/disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 400 kata.

Inovasi SiPURBA sangat mungkin dan mudah untuk direplikasi di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut karena di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia menerbitkan perizinan reklame dengan pola dan alur yang sama menggunakan sistem informasi masing-masing bahkan ada yang masih manual.

Pemohon reklame merupakan perusahaan perorangan maupun non perorangan yang tumbuh di setiap kabupaten. Perusahaan-perusahaan besar bidang Advertising (periklanan outdoor) biasanya mempunyai banyak asset lintas kabupaten bahkan lintas propinsi. Saat ini pengurusan perizinan mereka masih harus mendatangi satu persatu kabupaten/kota dimana asetnya berada atau untuk daerah yang sudah online maka akan masuk ke beberapa aplikasi sesuai kabupaten yang dituju.

Masyarakat/pemohon masih harus masuk ke akun masing-masing kabupaten/kota apabila SiPURBA direplikasi, namun jika dikembangkan lebih jauh maka masyarakat cukup mempunyai satu akun SiPURBA untuk mengakses banyak lokasi lintas kabupaten/kota/provinsi.

Informasi keberadaan asset masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang advertising juga dapat diakses oleh masyarakat atau pengusaha yang ingin menyewa atau menggunakan jasa tersebut lengkap dengan titik lokasi dan tarif di masing-masing daerah yang pasti berbeda-beda.

Nilai lebih dari Aplikasi SiPURBA dibanding dengan aplikasi lain yang serupa di berbagai daerah adalah pada fitur pemanfaatan virtual account yang sedang menjadi trend metode pembayaran saat ini baru terbatas digunakan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce seperti lazada, shopee, tokopedia, bukalapak dan lain-lain.

[Terlampir bukti dukung](#)

Keberlanjutan (20%)

Jelaskan sumber daya yang digunakan (berupa sumber daya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material), strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial), serta faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan inovasi.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 600 kata.

I. Sumber daya

Sumber daya yang digunakan meliputi keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga melalui sub kegiatan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Yang Tersaji Secara Elektronik, serta pengembangan sistem yang terkoordinasikan dengan DINKOMINFO maupun BAKEUDA. Adapun untuk sumber daya manusia tersedia petugas front office dan back office, maupun layanan aduan maupun konsultasi online berbasis web maupun WA, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan apabila menghadapi kendala terkait pelayanan perizinan menggunakan SiPURBA.

Rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengoptimalkan kinerja SiPURBA. Jika ada keluhan/komplen dari masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bisa segera mengantisipasi serta melaksanakan perbaikan atau pemeliharaan sistem agar bisa tetap terakses oleh masyarakat dengan mudah.

Bahwa strategi pengembangan SiPURBA :

- a. secara institusional dan sosial diharapkan akan mengakomodir jenis layanan perizinan lainnya yang telah didelegasikan kepada DPMTSP Kabupaten Purbalingga.
- b. secara manajerial maka inovasi SiPURBA mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan DPMTSP melalui indikator terukur adalah Kepuasan Masyarakat.

[Terlampir bukti dukung](#)

Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini.

Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.

Maksimal 200 kata.

Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini.

Tim Teknis Perizinan yang terlibat dalam inovasi SiPURBA adalah :

1. Kepala DPMPSTP
2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
3. Kepala BAKUDA dan Bidang Pendapatan BAKUDA
4. Kepala Satpol PP dan jajarannya
5. Bank Jateng selaku Bank persepsi

[Terlampir bukti dukung](#)